

Pelayanan Publik

Stasiun PSDKP Belawan

disampaikan oleh:

Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
Kepala Stasiun PSDKP Belawan

Medan, 5 September 2024

Pedoman Pelayanan Publik

1. **UU No. 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik
2. **PP No. 96 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. **PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017** tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
4. **PermenKP No.33 tahun 2017** tentang Perubahan atas PermenKP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP



Jenis Pelayanan Publik

1

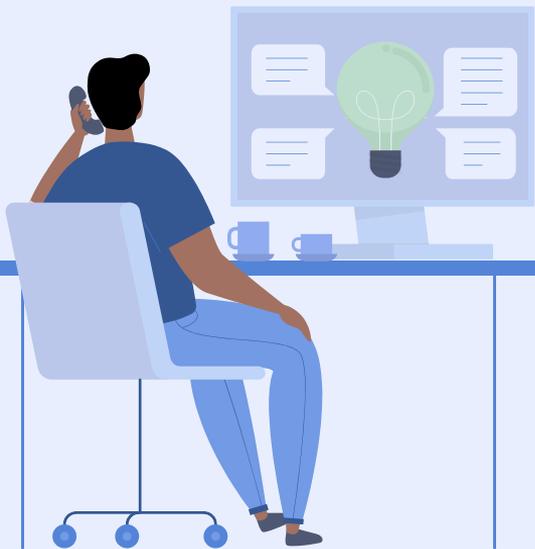
**Penerbitan Standar Laik
Operasi (SLO)**

2

**Penerbitan Lembar Verifikasi
Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)**



Lokasi Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan SLO & LVHPI



11

Lokasi
Penerbitan SLO

1

Lokasi
Penerbitan
LVHPI

Stasiun PSDKP Belawan

Satwas SDKP Asahan

Satwas SDKP Langsa

Satwas SDKP Rokan Hilir

Wilker PSDKP Idi Rayeuk

Wilker PSDKP Batu Bara

Wilker PSDKP Bireun

Wilker PSDKP Lhokseumawe

Wilker PSDKP Dumai

Wilker PSDKP Sigli

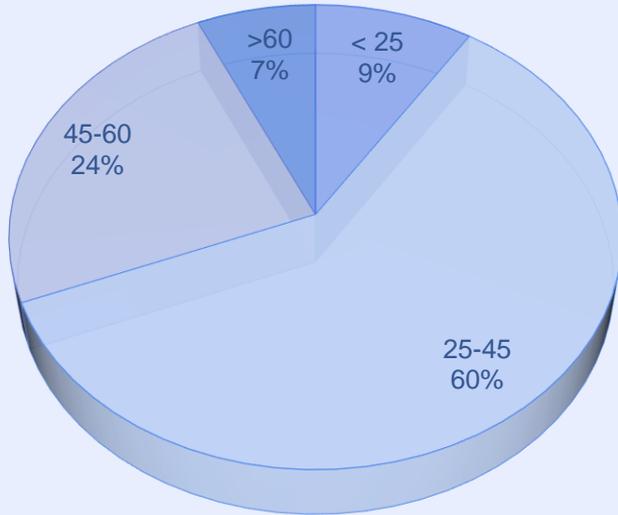
Wilker PSDKP Panipahan

Stasiun PSDKP Belawan

No.	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
	b. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis				<p>g. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih</p> <p>h. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</p> <p>i. Pemeriksaan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi NIB dan izin; 2) bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK Kedatangan; dan 4) kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. <p>j. Pemeriksaan Tambahan Persyaratan Administrasi Kapal Perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status hukum kapal perikanan; dan 2) keberadaan bukti pemenuhan kewajiban pemilik/penanggung jawab kapal perikanan atas pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk denda administratif. <p>k. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan 3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP. <p>l. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan 3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP. <p>m. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan, kapal Penelitian, Eksplorasi Perikanan terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>n. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan (call sign); 2) kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan 3) keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan. 			<p>Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal (on Board) menggunakan aplikasi eSLO</p> <p>Pemeriksaan fisik di atas kapal dibuktikan dengan dokumentasi geo-tagging. 1 dokumentasi yang diupload ke aplikasi eSLO adalah dokumentasi yang menunjukkan pengawas perikanan di atas kapal (direkomendasikan foto selfie) dengan latar belakang nama kapal.</p>

No.	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	<p>Penerbitan HPK Keberangkatan / BA-HPK</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diterbitkan HPK keberangkatan yang terdiri atas:</p> <p>a). HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis; atau</p> <p>b). HPK keberangkatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;</p> <p>BA HPK disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)</p>		<pre> graph TD Start([Pentagon]) --> Decision{ } Decision -- tidak sesuai --> Selesai1([Selesai]) Decision -- sesuai --> Selesai2([Selesai]) </pre>			5 Menit	HPK Keberangkatan	<p>Pengawas Perikanan menerbitkan HPK Keberangkatan:</p> <p>1. dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan berupa temuan ketidaksesuaian dan kapal tidak diterbitkan SLO;</p> <p>2. dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kapal telah sesuai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan kapal diterbitkan SLO</p> <p>Terhadap HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis agar diperbaiki dan dapat dimohonkan kembali</p> <p>Dalam hal hasil pemeriksaan kelayakan teknis ditemukan dugaan pelanggaran administratif dan/atau pidana, Pengawas Perikanan melaporkan kepada Kepala UPT untuk proses lebih lanjut.</p>
4	<p>Penerbitan SLO</p> <p>SLO disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)</p>		<pre> graph TD Start([Pentagon]) --> Selesai([Selesai]) </pre>			5 Menit	SLO	SLO Berlaku 2X24 jam

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II (Periode 1 April – 30 Juni 2024) Pada Pelayanan Penerbitan SLO



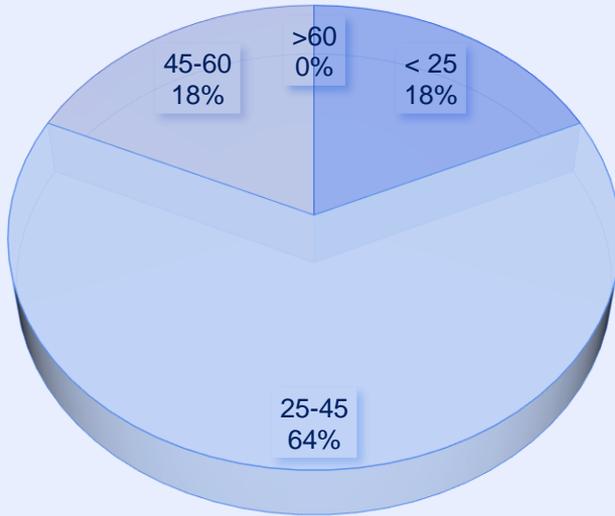
*responden berdasarkan kelompok usia

NILAI SKM

90,04
(Sangat Baik)



Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II (Periode 1 April – 30 Juni 2024) Pada Pelayanan Penerbitan LVHPI



*responden berdasarkan kelompok usia

NILAI SKM

88,38
(Sangat Baik)



Identifikasi Permasalahan pada FKP 2023 dan Tindak Lanjut

No	Identifikasi	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Kantor Stasiun PSDKP Belawan terkena banjir pasang air laut yang menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan SLO.	Perbaikan bangunan kantor dan ruang pelayanan Stasiun PSDKP Belawan	Sampai Dengan Tahun 2024	Telah dilakukan perbaikan bangunan dan ruang pelayanan di Stasiun PSDKP Belawan yang masih berlangsung sampai dengan 2024
2.	Perubahan hari pelayanan yang semula Senin-Jum'at menjadi Senin-Minggu yang jam pelayanannya tetap disesuaikan dengan adanya permohonan yang masuk untuk penerbitan HPK dan SLO.	Pembuatan jadwal piket yang disesuaikan dengan adanya program PIT serta menyediakan petugas yang akan standby dalam pengecekan pendaratan kapal perikanan skema Pasca Produksi	1 Bulan	Jadwal piket telah disusun serta disesuaikan dengan adanya program PIT.



THANKS!

Stasiun PSDKP Belawan

Jl. Gabion, Medan Kota Belawan

(061) 6943047/6943134

<https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan>



Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan

